

**EVALUATING THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE  
GOVERNANCE USING CENTER FOR GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE GADJAH MADA UNIVERSITY (CGCG UGM) MODEL  
(A STUDY OF REGIONAL DEVELOPMENT BANK (BPD) OF  
YOGYAKARTA SPECIAL REGION)**

**GIOVANNI ANIZZA PUTRI**

Magister Akuntansi

Universitas Gadjah Mada

Yogyakarta

Email: [giovanni.anizzaputri@gmail.com](mailto:giovanni.anizzaputri@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study aimed to measure and to assess the quality of Corporate Governance implementation at Bank BPD DIY using the Center for Good Corporate Governance of Gadjah Mada University (CGCG UGM) rating model. Assessment of CG implementation in Bank BPD DIY was carried out using CGCG UGM questionnaires with 497 questions. The questions were made based on 4 (four) basic constructs of CGCG UGM consisting of transparency, accountability, responsibility, and fairness. The research respondents were 44 including board of commissioners, board of directors, corporate committee, and stakeholders of Bank BPD DIY.*

*The results of the measurement and assessment of the implementation of Corporate Governance at Bank BPD DIY using the CGCG UGM rating model indicated a total score of 3742.5 with an A + rating. This rating indicated a probability of 20% or less than 20% and showed a small portion of probability level of information bias or information asymmetry in their operations. This score indicated that the main parties, owners of capital, creditors, government, suppliers, consumers and the people had no doubt about the firm over their resources management. Regarding the disclosure of information, the firm has comprehensively and reliably disclosed all corporate activities with perfect governance both internally and publicly. It means that information bias and information asymmetry in resource management did not exist.*

**Keywords:** *corporate governance, transparency, accountability, responsibility, fairness, board of commissioners, board of directors, corporate committees, stakeholders, CGCG UGM.*

**EVALUASI IMPLEMENTASI *CORPORATE GOVERNANCE*  
MENGUNAKAN MODEL *CENTER FOR GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE* UNIVERSITAS GADJAH MADA (CGCG UGM) (STUDI  
PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) DIY**

**GIOVANNI ANIZZA PUTRI**  
Magister Akuntansi  
Universitas Gadjah Mada  
Yogyakarta  
Email: [giovanni.anizzaputri@gmail.com](mailto:giovanni.anizzaputri@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menilai kualitas penerapan *Corporate Governance* pada Bank BPD DIY dengan menggunakan model pemeringkatan *Center for Good Corporate Governance* Universitas Gadjah Mada (CGCG UGM). Penilaian penerapan CG Bank BPD DIY ini diukur melalui kuesioner CGCG UGM yang berjumlah 497 pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan 4 (empat) konstruk dasar CGCG UGM yang terdiri dari transparansi, pertanggungjelasn, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Responden penelitian sebanyak 44 responden yang meliputi dewan komisaris, dewan direksi, komite perusahaan, dan para pemangku kepentingan Bank BPD DIY.

Hasil penilaian penerapan *Corporate Governance* pada Bank BPD DIY dengan menggunakan model pemeringkatan CGCG UGM diperoleh total skor sebesar 3742,5 dengan peringkat A+. Peringkat ini menunjukkan probabilitas 20% atau kurang dari 20% bahwa perusahaan dalam tingkat kemungkinan kecil melakukan bias informasi atau asimetri informasi dalam kegiatan operasinya. Skor ini memberikan kesimpulan bahwa pihak-pihak utama, pemilik modal, kreditor, pemerintah, pemasok, konsumen dan masyarakat tidak ragu lagi terhadap perusahaan atas pengelolaan seluruh sumberdaya. Dalam keterkaitannya dengan pengungkapan informasi, perusahaan telah mengungkapkan secara komprehensif dan handal segala aktivitas perusahaan dengan tata kelola yang sempurna, baik secara internal maupun publik. Hal ini juga memiliki arti bahwa bias informasi dan asimetri informasi dalam pengelolaan sumberdaya tidak dilakukan oleh manajemen.

***Kata kunci: corporate governance, transparansi, pertanggungjelasn, pertanggungjawaban, kewajaran, dewan komisaris, dewan direksi, komite perusahaan, pemangku kepentingan, CGCG UGM***

## PENGANTAR

Krisis keuangan pada tahun 1997 dan 2008 yang disebabkan oleh praktik tata kelola atau biasa disebut *corporate governance* (CG) yang tidak memadai, membuat bank dan lembaga keuangan kehilangan kepercayaan publik. Bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat mengalami kesulitan dalam beradaptasi di masa krisis. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional pun muncul dan memicu terjadinya penurunan kepercayaan terhadap perbankan. Gregory dan Simms (1999) menyatakan bahwa praktik CG yang efektif mendorong penggunaan sumber daya secara efisien baik di dalam perusahaan dan sektor ekonomi secara umum. Dalam hal ini, tata kelola yang efektif membantu melindungi dan menumbuhkan sumber daya yang langka, dan membantu memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi. Tjondro dan Wilopo (2011) menyimpulkan bahwa GCG memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap indikator-

indikator profitabilitas dalam perusahaan-perusahaan sektor perbankan seperti *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE) dan *Net Interest Margin* (NIM).

Bank Indonesia sebagai bank sentral berperan untuk menjaga stabilitas perekonomian, stabilitas sistem keuangan termasuk menjaga likuiditas perbankan. Tingkat kesehatan bank umum yang baik, tentu saja akan mempengaruhi kondisi makro ekonomi negara.

Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang merupakan badan usaha otonomi daerah berperan untuk memajukan potensi-potensi daerah dengan mendukung perkembangan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan penyediaan permodalan, tingkat bunga yang rendah dengan kualitas pelayanan dan kompetensi SDM yang mumpuni. Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan yang memiliki tugas sebagai penggerak, pendorong laju pembangunan daerah

serta menjalankan usaha sebagai bank umum.

*Center for Good Corporate Government* Universitas Gadjah Mada (CGCG UGM) merupakan salah satu lembaga yang bertujuan mempromosikan dan mendorong penerapan GCG di Indonesia. Penilaian terhadap praktik GCG Bank BPD DIY merupakan salah satu langkah untuk meyakinkan bahwa Bank BPD DIY tidak memiliki risiko kegagalan tata kelola, sehingga perusahaan akan *going concern*. Penilaian dengan menggunakan model pemeringkatan CGCG UGM juga diharapkan dapat memastikan dan membuktikan praktik penerapan GCG yang sudah memadai di Bank BPD DIY. Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan penelitian terkait CG yang berjudul “Evaluasi Implementasi *Corporate Governance* Menggunakan Model *Center for Good Corporate Governance* Universitas Gadjah Mada (CGCG UGM) (Studi pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY)”.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Definisi *Corporate Governance***

Bank Indonesia mendefinisikan CG sebagai suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Sedangkan FCGI mendefinisikan CG sebagai Seperangkat aturan yang mendefinisikan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka, atau sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan.

### **Teori Keagenan**

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak dimana satu orang prinsipal atau lebih terikat dengan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa layanan mewakili prinsipal yang melibatkan pendelegasian sebagian wewenang dan pengambilan keputusan kepada agen. Jika kedua belah pihak dalam hubungan ini dianggap sebagai *utility*

*maximizers*, maka agen mungkin tidak akan selalu bertindak dalam kepentingan terbaik prinsipal.

### **Teori Pemangku Kepentingan**

Perusahaan memiliki pemangku kepentingan (*stakeholders*), yaitu kelompok dan individu yang mendapatkan manfaat dari dan/atau dirugikan oleh, dan yang hak-haknya dilanggar atau dihormati oleh aksi perusahaan (Freeman, 2001). Konsep pemangku kepentingan merupakan generalisasi dari gagasan pemegang saham (*stockholders*) yang memiliki beberapa klaim khusus pada perusahaan. Seperti pemegang saham yang memiliki hak untuk menuntut tindakan tertentu oleh manajemen, begitupun pemangku kepentingan lainnya yang memiliki hak untuk membuat klaim.

### **Manfaat Penerapan *Corporate Governance***

Penerapan CG yang memadai akan memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan, pemegang saham, dan secara luas memberikan manfaat di sektor ekonomi dan

industri. Banks (2004) menjelaskan bahwa CG dapat mengatasi konflik kepentingan dalam perusahaan. Konflik-konflik kepentingan tersebut mungkin akan timbul dalam proses akuisisi dan *merger*, proses penyusunan pelaporan keuangan, pemberian kompensasi, pemilihan komisaris dan komite-komite di dalam perusahaan, dan seleksi direktur. *Corporate Governance* juga dapat berfungsi untuk mengendalikan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan, menanamkan kontrol dan etika, serta mendorong transparansi di setiap jenjang perusahaan. Praktik CG yang optimal akan meningkatkan efisiensi operasional secara luas di perusahaan dan menyediakan *return* yang adil atas modal yang diinvestasikan oleh investor.

### **Prinsip-prinsip *Corporate Governance***

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) menjelaskan pokok dasar berpikir *good governance* kedalam lima prinsip-prinsip yaitu transparansi; akuntabilitas; dan tanggung jawab;

independensi; kewajaran dan kesetaraan. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penerapan CG terdiri dari lima prinsip yaitu (Warsono dkk, 2009) transparansi, pertanggungjelasan dan pertanggungjawaban, ketanggapan, independensi, dan keadilan.

### ***Corporate Governance* dengan Model Pemeringkatan CGCG UGM**

Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM melalui Penelitian Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB) mendefinisikan empat konstruk dasar yang membentuk sebuah konsep yang disebut dengan atau tata kelola koperasi yang baik bagi sebuah perusahaan. Keempat konstruk tersebut adalah kewajaran, transparansi, pertanggungjelasan dan pertanggungjawaban.

### **METODE PENELITIAN**

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari perusahaan dan pihak-pihak yang terkait melalui wawancara, dokumentasi dan kuesioner. Data

sekunder adalah data yang diperoleh dari perusahaan secara tidak langsung melalui media cetak dan internet, seperti situs Bank BPD DIY, dan situs Bank Indonesia. Penelitian dilakukan di Kantor Pusat Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY.

Evaluasi implementasi CG menggunakan CGCG UGM menggunakan kuesioner yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan pada empat prinsip yaitu transparansi, pertanggungjelasan, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan dengan jawaban berupa jenjang/tingkatan dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Kuesioner diberikan kepada responden yang terdiri dari: dewan komisaris sebanyak 1 (satu) responden, dewan direksi sebanyak 6 (enam) responden, komite sebanyak 6 (enam) responden, *corporate secretary* sebanyak 2 (dua) responden, pemilik sebanyak 2 (dua) responden, auditor sebanyak 1 (satu) responden, pemerintah dan regulator sebanyak 5 (lima) responden, karyawan perusahaan sebanyak 5

(lima) responden, nasabah sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) sebanyak 9 (sembilan) responden, dan masyarakat sebanyak 5 (lima) responden sehingga total responden yaitu 44 responden.

Penilaian penerapan CG berdasarkan model pemeringkatan CGCG UGM menggunakan kuesioner yang terdiri dari 497 pertanyaan berdasarkan 4 konstruk dasar CG (P2EB, 2015). Masing-masing konstruk dengan jumlah pertanyaan:

1. Prinsip transparansi dengan jumlah 186 pertanyaan.
2. Prinsip pertanggungjelasan dengan jumlah 124 pertanyaan.
3. Prinsip pertanggungjawaban dengan jumlah 67 pertanyaan.
4. Prinsip kewajaran dengan jumlah 120 pertanyaan.

Setiap pertanyaan mempunyai bobot masing-masing berdasarkan tiga isu atau topik perhatian dan perkembangan dalam pemeringkatan *corporate governance* CGCG UGM, yaitu:

1. Keberadaan regulasi; pertanyaan yang berada dalam isu atau topik

keberadaan regulasi diberi bobot

- 1.
2. Penerapan, pertanyaan yang berada dalam isu atau topik penerapan diberi bobot 2.
3. Pengembangan kesadaran mandiri; pertanyaan yang berada dalam isu atau topik pengembangan kesadaran mandiri diberi bobot 3.

Hasil penilaian penerapan CG dari model pemeringkatan CGCG UGM berdasarkan ranking tampak pada tabel

**Tabel 1 Hasil Penilaian Berdasarkan Ranking dari Model Pemeringkatan CGCG UGM**

No	Ranking	Nilai Minimal	Nilai Maksimal
1	A+++	3952	4170
2	A++	3744	3951
3	A+	3536	3743
4	A	3328	3535
5	A-	3120	3327
6	B++	2912	3119
7	B+	2704	2911
8	B	2496	2703
9	B-	2288	2495
10	C+	2080	2287
11	C	1872	2079
12	C-	1664	1871

No	Ranking	Nilai Minimal	Nilai Maksimal
13	D	1456	1663
14	D-	1248	1455
15	E	1040	1247
16	-	834	1039

Hasil penilaian CG CGCG UGM mempunyai hasil nilai maksimal sejumlah 4170, dan nilai minimal penilaian sejumlah 834. Kategori hasil penilaian penerapan CG berdasarkan model CGCG UGM terdiri dari 16 ranking.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil penilaian penerapan *Corporate Governance* (CG) pada Bank BPD DIY dengan menggunakan model pemeringkatan *Center for Good Corporate Governance* Universitas Gadjah Mada (CGCG UGM) ini diukur melalui kuesioner yang berjumlah 497 pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan empat konstruk dasar CGCG UGM. Responden CG yang terlibat dalam pengisian kuesioner berjumlah 44 responden yaitu Komisaris Utama,

Direksi, Komite, Sekretaris Perusahaan, Auditor Eksternal, dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) Bank BPD DIY

Penilaian penerapan CG berdasarkan model pemeringkatan CGCG UGM mempunyai tujuan untuk mengukur dan menilai kualitas penerapan CG pada Bank BPD DIY. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait keoptimalan penerapan CG kepada para pemangku kepentingan Bank BPD DIY. Hasil penilaian penerapan CG pada Bank BPD DIY sebagai berikut:

**Tabel 2 Hasil Penelitian**

Konstruk <i>Corporate Governance</i>	Hasil Penelitian	Rentang Nilai
Transparansi	1519,26	350-1750
Pertanggung Jelasan	854,86	178-890
Pertanggung Jawaban	501,09	115-575
Kewajaran	867,28	191-955
<b>Total</b>	3742,50	834-4170

Instansi : Bank BPD DIY

Skor : 3742,5

Keterangan : A+

Hasil *self assessment* GCG Bank BPD DIY tahun 2017, Bank BPD

DIY memperoleh peringkat ke 2 dari 5 ranking berdasarkan ketentuan penilaian *self assessment* GCG yang sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No 15/15/DPNP perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Model peratingan *Center for Good Corporate Governance* Universitas Gadjah Mada (CGCG UGM) yang digunakan dalam penilaian penerapan GCG pada Bank BPD DIY memiliki total 497 pertanyaan yang merupakan jabaran dari prinsip atau konstruk dasar CGCG UGM. Hasil masing-masing konstruk CGCG UGM adalah sebagai berikut:

**Tabel 3 Hasil Penilaian Konstruk Transparansi**

I. PENGUNGKAPAN YANG AKURAT DAN TEPAT WAKTU		Nilai Maksimal	Nilai Hasil	Persentase (%)
CT 1.	Penghurusan terhadap perusahaan untuk mengungkapkan secara berkala informasi kinerja keuangan perusahaan yang akurat dan tepat waktu	370	326	88%
CT 2.	Pembuatan mekanisme untuk menegakkan aturan pengungkapan informasi kinerja keuangan berkala perusahaan yang akurat dan tepat waktu	140	113	80%
II. PENGUNGKAPAN YANG KONSISTEN DAN DAPAT DIPERBANDINGKAN				
CT 3.	Pembuatan dan pengembangan standar pengungkapan kinerja keuangan perusahaan yang konsisten, dapat diperbandingkan, dan berterima secara internasional	230	203	88%
III. PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN				
CT 4.	Pengungkapan struktur kepemilikan saham perusahaan	80	74	93%
CT 5.	Pengungkapan hak voting special	60	46	77%
CT 6.	Pengungkapan isu-isu lainnya yang berkaitan dengan struktur kepemilikan saham perusahaan	190	166	87%
IV. PENINGKATAN PENGUNGKAPAN				
CT 7.	Mendorong peningkatan format dan teknik pengungkapan	255	223	87%
CT 8.	Penggunaan teknologi informasi terbaru	85	74	87%
IV. PENINGKATAN PENGUNGKAPAN				
CT 9.	Pengungkapan informasi nonkeuangan yang berkaitan dengan aset tak berwujud	340	295	87%
<b>Total Konstruk Transparansi</b>		<b>1750</b>	<b>1519</b>	<b>87%</b>

**Tabel 4 Hasil Penilaian Konstruk Pertanggungjelas**

I. STANDAR LEGAL TATA KELOLA PERUSAHAAN		Nilai Maksimal	Nilai Hasil	Persentase (%)
CA 1.	Mengartikulasikan secara jelas standar legal yang mengatur otoritas dan akuntabilitas dari manajemen, dewan komisaris, dan pemegang saham	115	112	97%
CA 2.	Pembuatan regulasi yang fleksibel dan terbuka untuk dilakukannya pengembangan	20	17	84%
II. PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM				
CA 3.	Melindungi dan mendorong pemegang saham untuk memberikan suara dan berpartisipasi dalam rapat umum pemegang saham tahunan dan rapat umum pemegang saham lainnya	75	75	100%
III. DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN				
CA 4.	Mendorong tingkat independensi dalam komposisi dewan komisaris perusahaan	145	143	99%
CA 5.	Pembuatan regulasi yang tidak "rigid" dalam jumlah dewan komisaris independen	65	65	100%
CA 6.	Komite audit, komite remunerasi, komite nominasi, <i>corporate secretary</i> , komite kebijakan risiko, dan komite kebijakan <i>corporate governance</i>	70	69	98%
IV. PRAKTEK AUDIT YANG SEHAT				
CA 7.	Mendorong terjadinya praktik audit yang sehat dalam perusahaan	245	226	92%
CA 8.	Mendorong penggunaan auditor independen	155	148	96%
<b>Total Konstruk Pertanggungjelas</b>		<b>890</b>	<b>855</b>	<b>96%</b>

**Tabel 5 Hasil Penilaian Konstruk Pertanggungjawaban**

I. KEPATUHAN PERUSAHAAN PADA HUKUM		Nilai Max	Nilai Hasil	Persentase (%)
CR 1.	Memastikan bahwa perusahaan patuh pada hukum	140	129	92%
II. KESEJAHTERAAN INDIVIDU				
CR 2.	Mendukung dan mendorong pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) perusahaan	150	134	89%
CR 3.	Mendukung dan mendorong ketentuan manfaat dana purnatugas	80	72	90%
CR 4.	Mendukung dan mendorong upaya-upaya lainnya untuk peningkatan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat	85	68	80%
III. DIVERGENSI PENDAPATAN DAN KESEMPATAN				
CR 5.	Mempertimbangkan implikasi penyimpangan yang signifikan dalam pendapatan dan kesempatan	120	98	81%
<b>Total Konstruk Pertanggungjawaban</b>		<b>575</b>	<b>501</b>	<b>87%</b>

**Tabel 6 Hasil Penilaian Konstruk Kewajaran**

I. KEJELASAN, KONSISTENSI, DAN KEPENAKANAN		Nilai Maksimal	Nilai Hasil	Persentase (%)
CF 1.	Pembuatan regulasi yang jelas dan konsisten untuk melindungi hak-hak pemegang saham	130	126	97%
CF 2.	Penciptaan sistem legal agar mampu menegakkan pedesainan regulasi	90	84	93%
CF 3.	Kesamaan perlakuan regulasi terhadap seluruh investor (minoritas dan mayoritas)	160	149	93%
II. KESALAHGUNAAN LITIGASI				
CF 4.	Membuat aturan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan aturan atas perlindungan hak dari pemegang saham	245	208	85%
III. KONTRAK DASAR, HUKUM KONSUMEN DAN KOMERSIAL				
CF 5.	Memastikan kecukupan sistem kontrak antara perusahaan dan konsumen	120	115	96%
CF 6.	Ketepatan hukum komersial dan perlindungan konsumen	85	78	91%
IV. DAMPAK REGULASI TERHADAP INVESTOR AKTIF				
CF 7.	Meninjau apakah regulasi sekuritas, pajak, dan regulasi lainnya terlalu menghalangi investor aktif	50	39	78%
CF 8.	Meninjau regulasi tersebut sekuritas, pajak, dan regulasi lainnya yang berkaitan dengan investor institusional, menghalangi mereka berpartisipasi sebagai investor aktif	50	45	91%
V. KORUPSI DAN PENYUAPAN				
CF 9.	Memastikan bahwa fungsi perusahaan di lingkungannya bebas dari korupsi dan penyuapan	25	24	96%
<b>Total Konstruk Kewajaran</b>		<b>955</b>	<b>867</b>	<b>91%</b>

Bank BPD DIY telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip CG dengan baik, namun penerapan CG di Bank BPD DIY masih belum optimal berdasarkan model pemeringkatan *Center for Good Corporate Governance* Universitas Gadjah Mada (CGCG UGM). Skor tersebut menunjukkan bahwa Bank BPD DIY sudah mendekati sempurna di dalam mengadopsi dan menerapkan seluruh hukum, regulasi dan aturan-aturan yang dibuat oleh regulator, serta menyajikan informasi kepada seluruh pihak terkait tanpa paksaan. Dari hasil skor tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kecil kemungkinan adanya informasi asimetris pada perusahaan sehingga para pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti pemegang saham (*stockholders*), nasabah, pemerintah dan masyarakat tidak meragukan informasi perusahaan yang disajikan.

Praktik CG yang baik tidak hanya berfokus pada kepentingan para pemilik/pemegang saham (*stockholders*) saja, namun perusahaan juga memiliki tanggung jawab dengan banyak pihak yang

dapat dikategorikan sebagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Pemangku kepentingan perusahaan seperti nasabah, karyawan, pemerintah, masyarakat dan pihak lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan, dapat mempengaruhi jalannya perusahaan. Pihak manajemen sebagai agen tidak dapat hanya mementingkan kepentingan prinsipal saja (dalam hal ini *stockholders*). Sudah sewajarnya manajemen sebagai agen memiliki hubungan berkelanjutan yang saling menghormati, terbuka dan saling percaya satu sama lain dengan para pemangku kepentingan, sehingga hubungan yang positif dengan para pemangku kepentingan dapat menjadi sumber nilai dan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Adanya penerapan praktik GCG relevan dengan teori pemangku kepentingan.

Keberadaan perusahaan dan hubungannya dengan para pemangku kepentingan harus dilindungi melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Kemampuan perusahaan untuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan akan

berdampak terhadap keberhasilan atau kegagalan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Penilaian dengan melibatkan responden dari pemangku kepentingan Bank BPD DIY menunjukkan hasil positif dari penerapan prinsip-prinsip dasar CGCG UGM yaitu transparansi, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Terlihat bahwa terdapat hubungan dan keterkaitan antara manajemen atau pengelola perusahaan dengan para pemangku kepentingan dari Bank BPD DIY. Hasil penilaian yang diperoleh sudah baik walaupun belum optimal dalam keberadaan regulasi, penerapannya dan pengembangan kesadaran mandiri. Upaya untuk terus menerus mengoptimalkan penerapan CG yang baik akan menghasilkan banyak manfaat dan keuntungan kepada Bank BPD DIY dan para pemangku kepentingannya.

#### **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Hasil penilaian penerapan *Corporate Governance* (CG) berdasarkan model pemeringkatan

*Center for Good Corporate Governance* (CGCG UGM) pada Bank BPD DIY memperoleh skor “A+” dengan total nilai 3742,5 dari nilai maksimal 4170 atau 89,75%. Hasil skor “A+” berada pada posisi 3 dari 16 ranking hasil analisis pemeringkatan CGCG UGM. Skor “A+” pada Bank BPD DIY menunjukkan probabilitas 20% atau kurang dari 20% bahwa perusahaan dalam tingkat kemungkinan kecil (*unlikely error or remote*) melakukan bias informasi atau asimetri informasi dalam kegiatan operasinya. Skor ini memberikan kesimpulan bahwa pihak-pihak utama, pemilik modal, kreditor, pemerintah, pemasok, konsumen dan masyarakat tidak ragu lagi terhadap perusahaan atas pengelolaan seluruh sumberdaya. Dalam keterkaitannya dengan pengungkapan informasi, perusahaan telah mengungkapkan secara komprehensif dan handal segala aktivitas perusahaan dengan tata kelola yang sempurna, baik secara internal maupun publik. Hal ini juga memiliki arti bahwa bias informasi dan asimetri informasi

dalam pengelolaan sumberdaya tidak dilakukan oleh manajemen.

Berdasarkan hasil penilaian penerapan CG tersebut dapat diketahui bahwa penerapan CG di Bank BPD DIY belum optimal dalam keberadaan regulasi, penerapannya, dan terutama dalam pengembangan kesadaran mandiri sesuai dengan *Center for Good Corporate Governance* Universitas Gadjah Mada (CGCG UGM). Bank BPD DIY perlu meningkatkan penerapan CG terkait keberadaan atau pengadopsian, penerapan, dan kesadaran pengembangan regulasi secara sukarela guna mencapai tingkat efektivitas yang optimal dan ranking teratas dalam penilaian CG berdasarkan CGCG UGM. Perusahaan sebaiknya memperhatikan dan meningkatkan penerapan CG, khususnya subdimensi yang memiliki hasil nilai dibawah 85%. Persentase sebesar 85% merupakan persentase nilai minimal ranking A+ yaitu 3536 terhadap nilai maksimal model pemeringkatan sebesar 4170. Beberapa hal yang sebaiknya perusahaan perhatikan yaitu:

1. Pada konstruk pertanggungjelasan sub konstruk “pembuatan regulasi yang fleksibel dan terbuka untuk dilakukannya pengembangan” menunjukkan persentase 84%, hal ini membuktikan bahwa sub konstruk tersebut belum optimal dari segi penerapan regulasi dalam perusahaan. Perusahaan sebaiknya membuat regulasi yang lebih fleksibel dan terbuka untuk melakukan pengembangan terhadap aturan internal terkait standar legal tata kelola perusahaan. Aturan internal ini akan mengatur berbagai kewajiban dan tanggung jawab dewan komisaris, dewan direksi, dan komite perusahaan.
2. Pada konstruk kewajaran sub konstruk “meninjau apakah regulasi sekuritas, pajak, dan regulasi lainnya terlalu menghalangi investor aktif” menunjukkan persentase 78%, hal ini membuktikan bahwa sub konstruk tersebut belum optimal dari segi penerapan dan pengembangan mandiri. Perusahaan sebaiknya melakukan tinjauan secara berkala pada

regulasi-regulasi terkait sekuritas, pajak, dan regulasi perbankan lain terkait investor aktif. Bagaimanapun, Bank BPD DIY merupakan perusahaan tertutup, sehingga dalam praktiknya perusahaan merasa bahwa penerapan dari regulasi tersebut kurang relevan.

3. Pada konstruk transparansi sub konstruk “pembuatan mekanisme untuk menegakkan aturan pengungkapan informasi kinerja keuangan berkala perusahaan yang akurat dan tepat waktu” menunjukkan persentase 80%, hal ini membuktikan bahwa sub konstruk tersebut belum optimal dari segi penerapan dan pengembangan mandiri. Perusahaan sebaiknya membuat dan menerapkan mekanisme untuk menegakkan aturan pengungkapan informasi kinerja keuangan berkala perusahaan yang akurat dan tepat waktu. Walaupun perusahaan telah melakukan pengungkapan informasi kinerja keuangan berkala perusahaan secara akurat dan tepat waktu, adanya

mekanisme untuk menegakkan aturan ini akan membuat praktik CG yang lebih baik.

4. Pada konstruk transparansi menunjukkan bahwa penerapan CG yang belum optimal terlihat pada pengungkapan kepemilikan khususnya terkait pengungkapan hak voting istimewa, menunjukkan persentase 77%, hal ini membuktikan bahwa sub konstruk tersebut belum optimal dari segi penerapan dan pengembangan mandiri. Perusahaan sebaiknya memiliki peraturan internal yang mewajibkan adanya regulasi terkait pengungkapan hak-hak khusus dari pemegang saham mayoritas, dan adanya regulasi yang mengharuskan pengungkapan terhadap hak-hak khusus dari pemegang saham tertentu dalam perusahaan. Hal ini berkaitan dengan pengungkapan isu-isu yang berkaitan dengan hak *voting* istimewa. Bank BPD DIY telah mengungkapkan pemegang saham mayoritas dan minoritas, beserta besarnya saham yang dimiliki para pemegang saham,

akan tetapi lebih baik apabila pengungkapan ini lebih diperinci sesuai dengan standar CGCG UGM sehingga penilaian praktik CG lebih optimal.

5. Pada konstruk pertanggungjawaban menunjukkan bahwa penerapan CG yang belum optimal terlihat pada kurangnya upaya-upaya perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar dimana perusahaan beroperasi, sub konstruk ini memiliki persentase 80%.. Untuk mendukung dan mendorong upaya-upaya peningkatan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat, perusahaan sebaiknya melakukan perbaikan dan peningkatan dalam pemberian kesempatan kerja pada masyarakat sekitar lingkungan perusahaan, dan memprioritaskan perekrutan calon karyawan yang berdomisili di sekitar perusahaan.
6. Pada konstruk pertanggungjawaban sub konstruk divergensi pendapatan dan kesempatan, memiliki persentase 81%. Sub konstruk ini terbukti belum memiliki nilai optimal baik

dari segi adanya regulasi, penerapan, dan kesadaran mandiri. Perusahaan sebaiknya memiliki dan mempertimbangkan adanya regulasi terkait implikasi penyimpangan yang signifikan dalam pendapatan dan kesempatan. Regulasi ini akan membantu keberlangsungan usaha kecil masyarakat dengan adanya pemberdayaan, pembinaan, dan pengembangan usaha-usaha kecil dari masyarakat.

Hasil penilaian penerapan CG Bank BPD DIY dapat dikatakan sudah baik namun masih belum mencapai peringkat teratas, sehingga masih belum optimal berdasarkan model pemeringkatan CGCG UGM. Bank BPD DIY perlu melakukan sosialisasi pedoman, sistem, prosedur, kebijakan dan regulasi dari pemerintah terkait praktik CG ke seluruh jenjang organisasi. Hal ini harus dilakukan hingga tiap orang dalam jenjang organisasi dapat mengetahui, memahami dan menerapkan CG yang efektif berdasarkan prinsip CG, pedoman dan peraturan yang berlaku. Praktik CG yang baik akan meningkatkan

penilaian CG, sehingga Bank BPD DIY dapat mencapai ranking teratas pada semua model pemeringkatan baik dalam metode *self assessment* yang diatur dalam PBI maupun dari lembaga-lembaga pemeringkatan GCG seperti CGCG UGM. Penerapan CG yang optimal akan meningkatkan tingkat kesehatan bank, meningkatkan kepercayaan pemegang saham serta para pemangku kepentingan terhadap Bank BPD DIY di tahun-tahun yang akan datang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Atmoko, Citro. 2014. "BI: Kajian Regional untuk Ukur Perekonomian Nasional". <http://www.antaraneews.com/berita/447373/bi--kajian-regional-untuk-ukur-perekonomian-nasional>. Diakses 20 Januari 2015.
- Bank Indonesia. 2006. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.
- Bank Indonesia. 2006. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.
- Bank Indonesia. 2011. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- Bank Indonesia. 2013. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP/2013 Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
- Banks, E. 2004. *Corporate Governance: Financial Responsibility, Control and Ethics*. Palgrave Macmillan.
- Choudhry, M. 2011. "Effective Bank Corporate Governance: Observations from the Market Crash and Recommendations for Policy". *Journal of Applied Finance & Banking*. Vol. 1(1): 179-211.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). 2000. "What is Corporate Governance". <http://www.fcgi.or.id/corporate-governance/about-good-corporate-governance.html>. Diakses pada 6 Juni 2016.
- Freeman, R.E. 2001. *Stakeholder Theory of the Modern Corporation, Perspectives in Business Ethics*, Volume 3,
- Freeman, R.E. and D. Reed. 1983. "Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance", *California Management Review*, 25.
- Gregory, H.J. and M.E. Simms. 1999. *Corporate Governance: "What it is and Why it Matters"*. *9<sup>th</sup> International Anti-Corruption Conference*.

- Jensen, M.C. and W.H. Meckling. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*, Vol. 3(4): 305-360.
- Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional DIY Triwulan III 2014 <http://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/yogya/Pages/Kajian-Ekonomi-dan-Kuangan-Regional-DIY-Triwulan-III-2014.aspx>. Diakses 20 Januari 2015.
- Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG). 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia 2006*. Jakarta: KNKG.
- OJK Dorong Akses Keuangan UMKM dan Pengembangan BPD <http://www.ojk.go.id/ojk-dorong-akses-keuangan-umkm-dan-pengembangan-bpd>. Diakses 20 Januari 2015.
- Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. 2015. "Dashboard Tata Kelola Korporasi Perusahaan bagi Seluruh Entitas Bisnis BUMN/D dan Swasta". Yogyakarta: P2EB.
- Sejarah singkat Bank BPD DIY; Visi dan Misi Bank BPD DIY. <http://www.bpddiy.co.id>. Diakses 15 Januari 2015.
- Tjondro, D. dan R. Wilopo. 2011. "Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap Profitabilitas dan Kinerja Saham Perusahaan Perbankan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia". *Journal of Business and Banking*, Vol. 1(1): 1-14.
- Unit Khusus Museum Bank Indonesia. Sejarah Bank Indonesia: Perbankan Periode 1997-1999.
- Warsono, S., F. Amalia, dan D. K. Rahajeng. 2009. *Corporate Governance Concep and Model: Preserving True Organization Welfare*. Yogyakarta. Center of Good Corporate Governance FEB UGM.
- Warsono, S., F. Amalia, dan D. K. Rahajeng. 2010. *CGCG's Corporate Governance Rating Model*. Yogyakarta. CGCG FEB UGM.